

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kebon Sirih Kawal BPPBJ

DPRD DKI Jakarta bakal mengusulkan membentuk tim pemantau Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI. Tujuannya, guna mengawasi kinerja juga penyerapan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan proses lelang di Pemrov DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio sambodo mengatakan, pada 2018 lalu, dewan sebelumnya telah mengusulkan membentuk tim pemantau BPPBJ ■

Namun, tak kunjung usulan itu terealisasi. Oleh sebab itu, sambung politisi PDI Perjuangan itu, periode kedepan akan kembali disulkan untuk membentuk tim pemantau serapan anggaran.

“Ini harus segera dibentuk gugus tugas untuk memantau tingkat penyerapan masing-masing SKPD agar bisa maksimal menggunakan ang-

garan,” ungkapnya kepada INDOPOS di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Menurut dia, tim pengawas membuat penyerapan anggaran Pemprov DKI akan lebih maksimal. Tim ini akan mengevaluasi satu per satu SKPD yang lambat mengeksekusi kegiatan dan mendeteksi kegiatan yang sudah dieksekusi, tetapi belum dibayar.

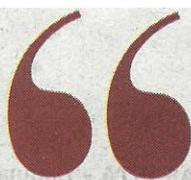
Dwi menuturkan, seharusnya BPPBJ sudah bisa aktif memanggil SKPD yang belum melakukan lelang. “Tinggal gugus tugasnya tuh yang melaksanakan pemantauan terhadap SKPD yang sudah mengadakan pengadaan tadi. Dia harus memantau, mendorong dan mencari solusi kalau ada kendala,” imbuh dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta Sutikno juga mendorong BPPBJ memperbaiki kualitas serapan agar anggaran yang telah direncanakan terasa untuk kepentingan warga Jakar-

ta. “Kami minta supaya BPPBJ melaksanakan optimalisasi penyerapan anggaran supaya lebih baik lagi,” ujar dia kepada INDOPOS di lokasi yang sama.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, BPPBJ sejatinya berbeda dengan SKPD pada umumnya. Selain wajib menyerap anggarannya secara optimal, BPPBJ juga wajib mensukseskan kegiatan lelang seluruh SKPD di lingkungan Pemprov DKI.

Sementara itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti beberapa kelemahan Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan APBD. Tidak hanya ditahun ini, namun juga di 2018. “Jadi memang harus dibentuk tim pemantau dan BPPBJ harus diperbaiki kinerjanya,” singkat dia saat dihubungi, Selasa (24/9/2019). (aen)



Kami minta supaya BPPBJ melaksanakan optimalisasi penyerapan anggaran supaya lebih baik lagi,”

Sutikno
Anggota DPRD
DKI Jakarta